

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

I.Made Maesa Wisnantara

NPP. 32.0823

Asdaf Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: mademaesa27@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Stunting is a serious public health issue with long-term impacts on human resource quality. Kotamobagu City, as a region committed to accelerating stunting reduction, has shown a positive trend in recent years. However, challenges remain, such as limited community engagement, inaccurate Posyandu data, and the suboptimal role of health cadres. This complexity requires not only a structured but also an adaptive cross-sectoral collaborative approach that fits local dynamics. **Purpose:** This study aims to analyze the process of Collaborative Governance in stunting management in Kotamobagu City using the theoretical framework by Ansell and Gash (2008), which emphasizes the overall dynamics of actor interaction—from starting conditions, institutional design, facilitative leadership, to the collaborative process and outcomes. **Method:** A qualitative research approach with a case study design was employed. The study involved key actors including local government, business stakeholders, local communities, and non-governmental organizations. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and then analyzed thematically to uncover patterns of collaboration. **Result:** The research method used is descriptive qualitative, with data collected through in-depth interviews, documentation, and literature review. Informants included local government officials, academics, religious leaders, and community organizations such as the PKK. **Conclusion:** The study concludes that the collaboration built so far is progressing in the right direction but needs to be strengthened through better grassroots coordination, data validity, and sustained collaborative evaluation. **Keywords:** Collaborative Governance, stunting reduction, collaboration process, multi-stakeholder actors, public health policy.

ABSTRAK

Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dengan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Kota Kotamobagu, sebagai wilayah yang berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting, telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterlibatan masyarakat yang terbatas, data Posyandu yang kurang akurat, serta peran

kader kesehatan yang belum optimal. Kompleksitas ini memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang tidak hanya terstruktur tetapi juga adaptif terhadap dinamika lokal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam penanganan stunting di Kota Kotamobagu dengan menggunakan kerangka teori dari Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pada dinamika interaksi antar aktor—mulai dari kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, hingga proses dan hasil kolaboratif. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian melibatkan aktor-aktor kunci seperti pemerintah daerah, pemangku kepentingan bisnis, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola-pola kolaborasi. **Hasil:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan tinjauan literatur. Informan terdiri dari pejabat pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat seperti PKK. **Kesimpulan:** Studi ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang telah terbangun sejauh ini berjalan ke arah yang tepat, namun perlu diperkuat melalui koordinasi akar rumput yang lebih baik, validitas data yang ditingkatkan, serta evaluasi kolaboratif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, penurunan stunting, proses kolaborasi, aktor multi-pemangku kepentingan, kebijakan kesehatan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024, salah satu prioritas pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas dan daya saing SDM (U Kusyairi, ID Sartika, H Hidayah, S Hartati, 2022). Upaya ini mencakup berbagai sektor, namun bidang kesehatan memiliki peran vital, karena kesehatan merupakan dasar dari produktivitas dan daya saing individu. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah penurunan prevalensi stunting, yakni kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan (Yahya, 2018).

Stunting telah menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga sangat memengaruhi perkembangan kognitif, kecerdasan, dan kapasitas belajar anak di masa depan. Akibatnya, stunting berpotensi menghambat produktivitas ekonomi dan daya saing bangsa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penanganan stunting bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan menjadi isu pembangunan nasional lintas sektor.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 21,6 persen, menempatkannya pada urutan ke-21 secara nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2021–2026, dengan target ambisius yaitu menurunkan angka stunting menjadi 12 persen pada tahun 2026 (A Masrich, 2023). Target ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara, termasuk Kota Kotamobagu yang menjadi salah satu daerah fokus dalam percepatan penurunan stunting.

Data kependudukan sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, termasuk pembuat kebijakan, kalangan pendidikan, dan masyarakat umum, karena data tersebut memainkan peran penting dalam pengelolaan penanggulangan permasalahan kependudukan saat ini (Hutasoit, 2017). Ketersediaan data yang akurat dan terbaru menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam perencanaan program lintas sektor seperti yang diatur dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Dalam konteks Kota Kotamobagu, data kependudukan dimanfaatkan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menetapkan lokasi prioritas, memetakan keluarga berisiko, serta mengkoordinasikan langkah-langkah kolaboratif antar perangkat daerah.

Kota Kotamobagu sendiri menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penurunan angka stunting. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah balita yang mengalami stunting sempat menurun dari 189 anak pada tahun 2022 menjadi 130 anak pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 160 anak hingga Agustus 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya konsisten dan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pelaksanaan program maupun dari segi partisipasi masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Sebagai respon terhadap situasi tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting Tahun 2024–2026 yang menekankan pada pendekatan kolaboratif lintas sektor. RAD ini dirancang sebagai panduan bagi perangkat daerah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat untuk melakukan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip tata kelola kolaboratif atau *Collaborative Governance*, yang menekankan keterlibatan berbagai aktor secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

Penerapan *Collaborative Governance* menjadi relevan karena kompleksitas persoalan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi atau sektor saja. Melalui kolaborasi yang efektif, diharapkan sinergi antara aktor pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan organisasi keagamaan dapat memperkuat intervensi serta memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat rumah tangga (Lelieveldt, 2023). Pemerintah Kota Kotamobagu juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai wadah koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan berbagai dinas terkait, lembaga masyarakat, dan tokoh lokal.

Meski demikian, pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, serta belum optimalnya pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan (McNaught, 2024). Selain itu, kurangnya komitmen dari sebagian pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah, juga menjadi hambatan serius dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam membangun kepercayaan, menyamakan persepsi, dan memastikan keterlibatan aktif semua pihak.

Sebagai langkah terobosan, Kota Kotamobagu juga menginisiasi program *Bapak Asuh Anak Stunting* (BAAS) sebagai bentuk partisipasi sosial dalam mempercepat penanganan stunting. Program ini mendorong aktor-aktor di luar pemerintah untuk menjadi “bapak asuh” bagi anak-anak stunting, melalui dukungan langsung berupa bantuan pangan bergizi, pendampingan keluarga, dan edukasi pengasuhan (Hysing, 2022). Program ini memperkuat keterlibatan masyarakat dan memperluas cakupan intervensi ke kelompok sasaran yang sulit dijangkau oleh program konvensional pemerintah. Pendekatan ini mencerminkan semangat *Collaborative Governance* yang berbasis pada solidaritas dan kemanusiaan.

Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana proses kolaborasi antar aktor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu. Penelitian ini tidak hanya akan berfokus pada hasil penurunan angka stunting, tetapi juga lebih menekankan pada proses kolaborasi yang terjadi, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi. Kerangka teoritis yang digunakan mengacu pada konsep *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008), yang mencakup lima dimensi utama: *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika kolaborasi dalam konteks lokal, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan bagi upaya percepatan penurunan stunting di daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat literatur tentang tata kelola kolaboratif di sektor kesehatan masyarakat. Dengan mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap implementasi kebijakan, maka penanggulangan stunting di Kota Kotamobagu tidak hanya menjadi wacana semata, tetapi benar-benar dapat diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Kota Kotamobagu menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan penurunan stunting, capaian yang dihasilkan masih fluktuatif. Penurunan jumlah kasus dari tahun 2022 ke 2023 tidak dapat dipertahankan secara konsisten, sebagaimana terlihat dari kenaikan kembali jumlah anak stunting pada pertengahan tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh, serta mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan, khususnya dalam aspek koordinasi antar-pemangku kepentingan (Sørensen & Torfing, 2021).

Lebih lanjut, terdapat kesenjangan nyata dalam hal keterlibatan masyarakat dan akurasi data pendukung. Keterbatasan partisipasi publik, terutama dari kelompok sasaran seperti keluarga balita dan ibu hamil, serta peran kader kesehatan yang belum optimal, menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat top-down masih dominan. Di sisi lain, validitas data Posyandu yang rendah menjadi hambatan signifikan dalam perencanaan dan evaluasi intervensi berbasis bukti. Kondisi ini memperlemah efektivitas *collaborative governance* yang idealnya bersandar pada partisipasi aktif dan keandalan informasi.

Terakhir, meskipun pendekatan *Collaborative Governance* sudah mulai diadopsi dalam dokumen perencanaan seperti RAD Stunting, belum ada kajian mendalam yang secara spesifik mengevaluasi dinamika kolaborasi antar aktor di tingkat lokal—baik dari aspek desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, hingga keberlanjutan evaluasi kolaboratif. Dengan kata lain, masih terdapat

kesenjangan teoretis dan praktis terkait bagaimana prinsip-prinsip Collaborative Governance benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam konteks lokal seperti Kotamobagu. Hal ini membuka ruang untuk penelitian yang lebih fokus dan mendalam dalam menilai efektivitas, hambatan, dan peluang dari tata kelola kolaboratif dalam penanganan stunting.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fardianti, Pimpi, dan Bintari (2024) menyoroti ketidakefektifan kolaborasi antar aktor dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menggunakan teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash serta metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif yang dijalankan belum berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi, kurangnya kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan minimnya pemahaman bersama atas isu stunting. Hal ini berdampak pada tidak signifikannya penurunan angka stunting di daerah tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya membangun kesepahaman dan komunikasi yang intensif sebagai fondasi tata kelola kolaboratif.

Penelitian kedua oleh Sumanti (2024) menggunakan metode literature review untuk menelaah berbagai studi terkait strategi penanggulangan stunting dengan pendekatan Collaborative Governance. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa model pentahelix, yang melibatkan lima unsur utama—pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media—merupakan pendekatan paling komprehensif (Grootjans et al., 2022). Kekuatan model ini terletak pada sinergi antar unsur yang saling melengkapi. Penelitian ini memberikan sudut pandang teoritis yang kuat tentang pentingnya keterlibatan multipihak dalam menurunkan prevalensi stunting secara sistemik, meskipun tidak mengeksplorasi secara mendalam tantangan dalam implementasi di tingkat lokal.

Selanjutnya, Fatikha dan Permatasari (2023) menganalisis kolaborasi antar kementerian dan lembaga pemerintah pusat dalam penanganan stunting. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis model interaktif dari Emerson dan Nabatchi, mereka menyimpulkan bahwa kolaborasi yang terjadi cukup solid, tetapi belum sepenuhnya efektif tanpa pengembangan lanjutan, khususnya dalam hal kesinambungan dan evaluasi bersama. Fokus penelitian ini lebih menekankan peran pemerintah pusat, berbeda dengan studi lain yang banyak membahas konteks lokal. Meskipun sinergi antar lembaga terlihat berjalan baik, penguatan pada integrasi vertikal dan keterlibatan daerah tetap menjadi tantangan besar.

Penelitian dari Simangunsong, Hutasoit, dan Jafa (2022), penerapan *dynamic governance* dalam penurunan stunting di Kabupaten Manggarai. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penurunan stunting di Manggarai berhasil menurunkan jumlah kasus dari 5.320 pada Februari 2022 menjadi 4.313 pada Agustus 2022. Penurunan ini merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor yang efektif, yang tidak hanya berdampak pada penurunan angka stunting, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas anak-anak di daerah tersebut. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat kolaborasi antar sektor dan mengarahkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan lingkungan yang terjadi.

Penelitian dari FoEh (2022) di Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan gambaran mendalam tentang hambatan struktural dan kultural dalam penerapan Collaborative Governance. Menggunakan pendekatan kualitatif dan teori Ansell dan Gash, penelitian ini menemukan bahwa ketidaksamaan

pandangan antar birokrat tentang urgensi stunting serta lemahnya komunikasi lintas sektor menjadi penghambat utama. Penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif tidak hanya tergantung pada kerangka institusional, tetapi juga pada kesiapan mental dan budaya birokrasi serta akurasi data yang menjadi dasar perencanaan (Lahat & Sher-Hadar, 2020).

Febriana dan Hertati (2023) dan Budiman (2023) melengkapi daftar studi dengan meneliti konteks Provinsi Jawa Timur dan Kota Palembang. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash. Penelitian Febriana dan Hertati menunjukkan hasil positif dari tata kelola kolaboratif yang dijalankan secara menyeluruh, yang berhasil menciptakan hasil antara yang menjanjikan. Sementara itu, Budiman menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan di Palembang sebagai kunci keberhasilan integrasi program. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan antar aktor, kejelasan peran, dan konsistensi komunikasi.

Dari keseluruhan studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun Collaborative Governance telah banyak diadopsi sebagai pendekatan dalam menurunkan angka stunting, tantangan implementatif masih dominan di berbagai daerah. Masalah komunikasi, kepercayaan, integrasi data, dan koordinasi lintas sektor menjadi kendala yang berulang. Perbedaan konteks geografis, kesiapan institusional, serta budaya birokrasi turut memengaruhi keberhasilan pendekatan ini (Hafer et al., 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih kontekstual dan aplikatif untuk mengevaluasi sejauh mana Collaborative Governance dapat diterapkan secara efektif dalam penanganan stunting, khususnya di daerah dengan kompleksitas sosial dan administratif tinggi seperti Kota Kotamobagu.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui fokus kontekstual yang spesifik terhadap implementasi *Collaborative Governance* di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara—sebuah wilayah yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti kolaborasi di tingkat nasional atau provinsi besar, penelitian ini menggali dinamika lokal dengan pendekatan studi kasus yang menekankan pada interaksi aktor lintas sektor di daerah dengan kapasitas kelembagaan yang unik dan keterbatasan sumber daya. Fokus ini memberikan perspektif baru dalam literatur tata kelola kolaboratif di wilayah pinggiran atau non-metropolitan.

Kebaruan lainnya terletak pada integrasi pendekatan teoritis dari Ansell dan Gash dengan dinamika partisipatif yang bersifat bottom-up, terutama dalam mengamati kontribusi dan hambatan di tingkat akar rumput, seperti kader kesehatan, organisasi masyarakat, dan Posyandu. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* tidak hanya bergantung pada desain institusi dan komitmen aktor utama, tetapi juga pada validitas data lapangan dan keaktifan komunitas yang selama ini cenderung dianggap sebagai pelengkap pasif. Penekanan pada pentingnya evaluasi kolaboratif yang berkelanjutan dan berbasis data akurat menjadikan studi ini sebagai rujukan bagi model intervensi yang lebih partisipatif dan adaptif (Duan et al., 2020).

Secara metodologis, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan teknik *participatory observation* secara langsung di lokasi pelaksanaan program stunting, yang memungkinkan pengamatan terhadap proses kolaborasi secara lebih mendalam dan naturalistik. Hasilnya, penelitian ini tidak hanya menyajikan gambaran formal tentang kolaborasi antarpihak, tetapi

juga mengungkap ketegangan, diskoneksi, serta potensi sinergi yang terjadi di lapangan. Temuan-temuan ini memperkaya khazanah ilmu administrasi publik dan kebijakan kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks perumusan strategi kolaboratif yang berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik lokal.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kota Kotamobagu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta unsur komunitas lokal seperti kader kesehatan dan Posyandu dijalankan, serta sejauh mana efektivitas interaksi dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan kebijakan dan program penurunan stunting. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi tata kelola kolaboratif yang adaptif terhadap konteks lokal Kota Kotamobagu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan alami sesuai konteks sosial yang terjadi, dalam hal ini adalah pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di Kota Kotamobagu. Kualitatif dinilai sesuai karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis statistik, melainkan ingin menggali proses kolaboratif dan dinamika interaksi antarpemangku kepentingan. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan karakteristik dari fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi terperinci mengenai peran, strategi, dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi tata kelola kolaboratif penanggulangan stunting.

Peneliti mengumpulkan data secara triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Teknik-teknik ini merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diamati. Dengan demikian, data yang didapatkan bersifat valid (menggambarkan kebenaran), reliabel (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, informan dipilih menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat membantu memahami masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022). Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 14 informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu. Informan tersebut terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Bappelitbangda, serta sejumlah pejabat fungsional di lingkungan OPD terkait. Selain itu, peneliti juga mewawancarai perwakilan kader posyandu, tokoh masyarakat, serta orang tua dari balita stunting sebagai penerima manfaat. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, serta posisi strategis mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash

(2008) sebagai landasan analisis, dengan lima dimensi utama yaitu face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2025 selama 21 hari di tiga lokasi utama, yakni kantor OPD terkait, posyandu, dan rumah tangga keluarga berisiko stunting.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini didasarkan pada teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Setiap dimensi dijabarkan dalam indikator yang spesifik untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, mengelompokkan, dan menganalisis data. Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap para informan kunci, seperti pejabat pemerintah, kader kesehatan, tokoh masyarakat, hingga warga terdampak. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, arsip kegiatan, regulasi daerah, serta jurnal dan penelitian sebelumnya yang relevan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap fenomena kolaborasi penanggulangan stunting.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti bertanggung jawab penuh dalam menentukan informan, memilih lokasi, mengumpulkan data, melakukan observasi, serta menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan data yang lebih terbuka dan mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi fisik yang relevan. Proses ini berlangsung selama masa penelitian dari Januari 6–25, 2025, sesuai dengan jadwal akademik IPDN. Lokasi penelitian dipusatkan di Kota Kotamobagu karena kota ini telah menunjukkan komitmen melalui regulasi dan aksi nyata dalam penanggulangan stunting, sehingga menjadi tempat yang relevan dan strategis untuk meneliti implementasi *Collaborative Governance* dalam konteks kebijakan publik daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Magang

Kota Kotamobagu merupakan sebuah wilayah yang secara administratif berada di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki posisi yang cukup strategis, terutama dalam pengembangan wilayah di bagian selatan provinsi tersebut. Kotamobagu terdiri atas empat kecamatan dan tiga puluh tiga desa atau kelurahan, yang secara geografis tersebar di lembah pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 180 hingga 130 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang dikelilingi oleh pegunungan menjadikan Kotamobagu sebagai daerah penghubung penting antar kabupaten di sekitarnya, seperti Bolaang Mongondow Induk dan Bolaang Mongondow Timur.

Dari segi demografi, Kota Kotamobagu memiliki jumlah penduduk yang relatif stabil, dengan data terbaru pada tahun 2023 mencatat sekitar 125.000 jiwa. Angka ini menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup terkendali, namun dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dalam hal ekonomi dan sosial. Kota ini memiliki sektor ekonomi utama yang didominasi oleh pertanian, perdagangan, dan jasa. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah bukan hanya pada aspek ekonomi, melainkan juga pada masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius, terutama dalam hal prevalensi stunting atau gagal tumbuh pada balita.

Secara geografis, Kota Kotamobagu berbatasan dengan beberapa kecamatan dan kabupaten yang saling berkaitan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolmong;

di timur dengan Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolmong; di selatan dengan Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong; dan di barat dengan Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolmong. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kotamobagu memiliki posisi yang sentral dalam konteks wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekitarnya, sehingga menjadi pintu gerbang dan pusat aktivitas sosial ekonomi di kawasan tersebut.

Kondisi sosial masyarakat Kotamobagu dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan lokal yang erat dengan kehidupan agraris. Hal ini tercermin dalam pola hidup, pola makan, dan interaksi sosial masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai budaya lokal. Namun, perubahan zaman dan perkembangan ekonomi membuat masyarakat Kota Kotamobagu semakin terbuka terhadap modernisasi, meskipun perubahan ini juga membawa tantangan baru dalam hal pola hidup sehat dan kesadaran gizi yang masih perlu ditingkatkan (Roengtam & Agustiyara, 2022).

Dalam aspek kesehatan masyarakat, Kota Kotamobagu menghadapi masalah yang cukup serius, terutama terkait tingginya angka stunting pada balita. Prevalensi stunting di wilayah ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah Kota Kotamobagu telah mengidentifikasi stunting sebagai isu strategis yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya tidak hanya terhadap kesehatan, tetapi juga terhadap perkembangan potensi sumber daya manusia di masa depan.

Upaya penanggulangan stunting di Kotamobagu telah menjadi prioritas pemerintah daerah, yang mencakup berbagai program dan kebijakan berbasis kolaborasi lintas sektor. Program-program tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil untuk secara bersama-sama menurunkan angka stunting. Namun, keberhasilan program ini masih menghadapi kendala dari berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, akses yang tidak merata, hingga hambatan budaya dan sosial.

Secara keseluruhan, gambaran umum lokasi magang di Kota Kotamobagu menampilkan sebuah wilayah dengan potensi besar tetapi juga tantangan yang kompleks, terutama dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui penurunan angka stunting. Kondisi geografis, demografi, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat menjadi konteks penting yang mempengaruhi strategi dan implementasi program-program kesehatan masyarakat di kota ini.

3.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Masyarakat Terkait Stunting

Permasalahan stunting di Kota Kotamobagu merupakan isu krusial yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Sulawesi Utara mencapai 21,6%, sementara di Kota Kotamobagu sendiri tercatat lebih tinggi, yakni sekitar 22,9%. Angka ini memang menunjukkan adanya tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 yang harus dicapai oleh daerah-daerah di Indonesia.

Faktor penyebab utama tingginya angka stunting di Kota Kotamobagu sangat kompleks dan saling terkait. Salah satu faktor dominan adalah rendahnya asupan gizi seimbang dalam keluarga, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi. Rendahnya kesadaran ini tidak hanya dialami oleh orang tua, tetapi juga berakar pada

kebiasaan sosial yang sudah turun-temurun sehingga sulit diubah secara cepat (Dupuy & Defacqz, 2022).

Selain itu, pola asuh yang kurang tepat menjadi penyumbang signifikan dalam kasus stunting. Banyak orang tua yang belum mengerti pentingnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi serta makanan pendamping ASI yang bernutrisi. Hal ini menimbulkan risiko kekurangan gizi pada anak sejak usia dini yang berujung pada stunting. Pengetahuan dan edukasi mengenai pola asuh ini menjadi sangat penting untuk diperkuat, khususnya di kalangan keluarga muda.

Akses terhadap layanan kesehatan juga masih menjadi tantangan utama. Beberapa wilayah di Kota Kotamobagu mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas kesehatan dan penyuluhan gizi, terutama di desa-desa yang terpencil. Keterbatasan ini menghambat upaya deteksi dini dan intervensi yang diperlukan untuk mencegah dan menangani stunting secara efektif. Peningkatan layanan kesehatan primer dan penyuluhan gizi menjadi salah satu fokus utama dalam program pemerintah (Ansell et al., 2020).

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih yang masih belum memadai di beberapa wilayah Kota Kotamobagu. Sanitasi yang buruk berkontribusi pada risiko penyakit infeksi yang dapat memperburuk status gizi anak. Oleh karena itu, program penanganan stunting juga perlu mengintegrasikan perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih yang layak sebagai bagian dari intervensi multisectoral (Mukhlis & Perdana, 2022).

Dalam merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu mengadopsi kebijakan berbasis Collaborative Governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Model kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam menurunkan angka stunting melalui berbagai program dan kegiatan terpadu.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan model kolaborasi ini adalah bagaimana mengintegrasikan peran dan kontribusi dari masing-masing pihak agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekosongan peran. Selain itu, budaya dan sikap masyarakat yang masih kurang peduli terhadap masalah gizi juga menjadi hambatan dalam membangun partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penurunan stunting.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan program penanganan stunting. Tingkat pendapatan keluarga yang rendah dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi membuat beberapa keluarga sulit memenuhi kebutuhan gizi yang optimal. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat sosial ekonomi juga perlu diperhatikan, misalnya melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga dan bantuan sosial yang tepat sasaran (Ulibarri et al., 2023).

Secara keseluruhan, kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di Kota Kotamobagu membentuk konteks yang kompleks bagi penanganan stunting. Berbagai faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga pendekatan penanganan stunting harus bersifat multisektoral dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses layanan kesehatan yang merata.

3.3 Proses dan Dinamika Kolaborasi Penanganan Stunting di Kota Kotamobagu

Penanganan stunting di Kota Kotamobagu menerapkan pendekatan Collaborative Governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Proses kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga membangun sinergi dan kepemilikan bersama terhadap upaya penurunan angka stunting. Namun, dalam pelaksanaannya, proses kolaborasi menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang perlu dicermati.

Kondisi awal kolaborasi menunjukkan bahwa sebelum adanya kerjasama yang terstruktur, berbagai pihak memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, bahkan terjadi beberapa konflik terkait strategi dan pelaksanaan program penanganan stunting. Sejarah pembentukan kolaborasi ini diawali dengan diterbitkannya Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting yang mewajibkan seluruh sektor terkait untuk terlibat aktif.

Pada tahun 2021, data dari Dinas Kesehatan mencatat 205 kasus balita stunting dari total 4.151 balita di Kota Kotamobagu. Merespons hal ini, Pemkot Kotamobagu menyelenggarakan Kick-off Meeting Strategi Nasional Penanganan Stunting yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta pihak swasta dan akademisi. Hal ini menandai awal terbentuknya forum kolaborasi yang semakin berkembang.

Dalam pelaksanaan kolaborasi, terdapat berbagai program yang dijalankan secara terpadu, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak stunting dan ibu hamil, sosialisasi pencegahan pernikahan dini, serta pengabdian masyarakat oleh akademisi. Keterlibatan perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan kader Posyandu turut memperkuat jaringan kolaborasi tersebut.

Namun, konflik dan hambatan tetap muncul, misalnya penolakan sebagian masyarakat untuk mengakui atau memperbaiki kondisi stunting anaknya. Selain itu, ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pemangku kepentingan menyebabkan proses kolaborasi belum optimal. Beberapa wilayah masih kesulitan mengakses makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai.

Desain kelembagaan kolaborasi cukup jelas dengan adanya regulasi yang mengatur keterlibatan berbagai pihak, seperti Keputusan Walikota Kotamobagu No. 51 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga masih perlu terus diperkuat agar seluruh program dapat berjalan efektif dan terintegrasi.

Kepercayaan antar pihak menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi. Pemkot Kotamobagu terus berupaya membangun komunikasi terbuka dan transparansi data untuk menciptakan rasa saling percaya (Qi & Ran, 2023). Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat dan kader Posyandu melalui pelatihan dan penyuluhan juga menjadi upaya untuk meningkatkan partisipasi dan komitmen.

Hasil sementara kolaborasi ini menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting dan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Namun demikian, keberlanjutan program menjadi perhatian utama agar dampak positif dapat berlanjut dan menimbulkan perubahan yang sistemik bagi Kota Kotamobagu.

Secara keseluruhan, proses kolaborasi dalam penanganan stunting di Kota Kotamobagu menunjukkan dinamika yang kompleks, namun juga memberikan harapan melalui pendekatan

multisektoral yang terorganisir dan partisipatif. Ke depan, penguatan kolaborasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama kesuksesan program ini.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan stunting di Kota Kotamobagu masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Meskipun pemerintah daerah telah menjalankan program kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui model Collaborative Governance, realisasi di lapangan masih terbentur pada perbedaan pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan resistensi budaya masyarakat terhadap perubahan pola asuh dan pola hidup sehat. Hal ini menegaskan bahwa penurunan angka stunting tidak hanya bergantung pada intervensi medis dan gizi semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan budaya yang mengakar dalam masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian mengungkap bahwa peran sinergi antar sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi, sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting. Kolaborasi yang efektif dapat mempercepat distribusi sumber daya, meningkatkan akses layanan kesehatan dan edukasi gizi, serta memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan dan program ekonomi keluarga. Namun, tantangan koordinasi antar lembaga serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan yang harus diatasi agar program berjalan optimal. Dengan demikian, peningkatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi perlu menjadi prioritas agar kolaborasi ini dapat berjalan berkelanjutan.

Terakhir, temuan juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai kunci keberhasilan jangka panjang penurunan stunting. Pendekatan yang partisipatif, melibatkan keluarga dan kader Posyandu secara aktif dalam proses edukasi dan pelaksanaan program, terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku yang positif. Kesadaran akan pentingnya asupan gizi yang seimbang dan pola asuh yang baik harus terus ditingkatkan melalui program berkelanjutan yang responsif terhadap kondisi lokal. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan pemerintah, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat menjadi formula utama dalam mengatasi masalah stunting secara holistik di Kota Kotamobagu.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait kolaborasi dan tantangan penanganan stunting, penelitian ini juga menemukan dinamika menarik dalam pola komunikasi antar pemangku kepentingan. Ternyata, keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga informal dan personal. Komunikasi yang intensif antara kader Posyandu, petugas kesehatan, dan keluarga penerima manfaat mampu menciptakan kepercayaan dan motivasi yang lebih tinggi dalam menjalankan program gizi dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek interpersonal menjadi salah satu faktor kunci yang seringkali terabaikan dalam perencanaan kebijakan, namun sangat menentukan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, penelitian mengungkap adanya perbedaan persepsi antara pihak pemerintah dan masyarakat terkait penyebab dan solusi stunting. Masyarakat cenderung melihat faktor ekonomi dan kebiasaan makan sebagai penyebab utama, sementara pemerintah lebih fokus pada penyediaan layanan kesehatan dan edukasi gizi. Ketimpangan persepsi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan program, jika tidak diatasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan dialog

terbuka. Oleh karena itu, penting bagi program pemerintah untuk lebih mengakomodasi perspektif dan kebutuhan masyarakat agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan konteks lokal dan dapat diterima dengan baik.

Temuan menarik lainnya adalah peran teknologi informasi dalam mempercepat koordinasi dan monitoring program penurunan stunting. Penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan data kesehatan dan pelaporan secara real-time membantu meningkatkan transparansi serta responsivitas antar lembaga terkait. Namun, keterbatasan akses dan kemampuan teknologi di tingkat desa masih menjadi kendala yang harus diatasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas program penanganan stunting di masa depan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Kotamobagu telah berjalan dengan cukup efektif. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, tenaga kesehatan, akademisi, hingga masyarakat, telah menunjukkan komitmen dan partisipasi yang aktif. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi yang berjalan cukup baik dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan bekerja sama secara terpadu dalam menangani permasalahan stunting.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat tercapainya kolaborasi yang optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga ahli yang terlibat. Keterbatasan ini memengaruhi kemampuan para pelaku kolaborasi untuk menjalankan program secara maksimal dan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya integrasi data antar instansi juga menjadi hambatan signifikan. Data yang tidak tersinkronisasi menyebabkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi kurang tepat sasaran, sehingga efektivitas program pun menurun.

Kapasitas pelaku kolaborasi, baik dalam aspek teknis maupun manajerial, juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi sumber daya manusia yang terlibat menjadi hal penting agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan kunci dalam memperkuat pelaksanaan collaborative governance di Kota Kotamobagu.

Regulasi lokal seperti Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2021 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting 2024–2026 menjadi landasan hukum dan operasional yang sangat penting dalam mengatur peran serta tanggung jawab antar pemangku kepentingan. Keberadaan regulasi ini membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini juga sangat bergantung pada bagaimana seluruh aktor menjalankan peran mereka dengan konsisten dan sinergis.

Secara keseluruhan, implementasi collaborative governance di Kota Kotamobagu sudah berada di jalur yang tepat. Kolaborasi yang terjalin telah mampu menggerakkan berbagai pihak untuk bersinergi dalam penanganan stunting. Akan tetapi, agar kolaborasi ini lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan, perlu adanya penguatan di berbagai aspek. Penguatan tersebut tidak hanya menyangkut

sumber daya, tetapi juga proses komunikasi, koordinasi, dan pengawasan yang lebih intensif di antara pemangku kepentingan.

Salah satu langkah penting ke depan adalah memperkuat koordinasi lintas sektor. Pemerintah Kota Kotamobagu perlu memastikan bahwa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan berjalan secara merata dan berkelanjutan. Keterlibatan ini harus melibatkan tidak hanya instansi pemerintah, tetapi juga sektor swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal agar pendekatan yang diambil benar-benar holistik dan menyentuh akar permasalahan stunting.

Selain itu, peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi serta data stunting menjadi kebutuhan mendesak. Data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi antar sektor dapat mempercepat proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Sistem informasi yang terkelola dengan baik juga memudahkan monitoring dan pelaporan, sehingga program penurunan stunting dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Pelatihan, pembekalan, serta pembinaan berkelanjutan harus diberikan agar para pelaku kolaborasi mampu menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka. Dengan kemampuan yang memadai, setiap aktor dapat berkontribusi secara maksimal dan adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

Terakhir, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan pelaksanaan program penurunan stunting perlu dilakukan secara sistematis. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, sehingga perbaikan dan penyesuaian program dapat dilakukan secara tepat waktu. Dengan demikian, pelaksanaan collaborative governance dapat terus ditingkatkan sesuai dengan dinamika kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, data yang digunakan sebagian besar bersifat kualitatif dengan cakupan wilayah terbatas pada Kota Kotamobagu, sehingga hasil temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian membatasi kedalaman analisis terhadap dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan serta dampak jangka panjang dari pelaksanaan collaborative governance dalam percepatan penurunan stunting. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional maupun situasi pandemi juga tidak sepenuhnya dapat dikontrol, yang berpotensi memengaruhi proses kolaborasi dan implementasi program.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studi dengan melibatkan lebih banyak daerah dan variabel kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas collaborative governance dalam penurunan stunting. Penelitian juga disarankan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kolaborasi serta dampak jangka panjangnya terhadap kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengembangan model evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dapat menjadi fokus untuk mempermudah monitoring dan penyesuaian program secara real-time. Penelitian masa depan juga dapat mengkaji peran inovasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi hasil yang lebih optimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A Masrich, A. Y. (2023). Formulasi Kebijakan. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & 't Hart, P. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: a mixed methods approach. *Policy and Society*, 39(4). <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>
- Duan, X., Dai, S., Yang, R., Duan, Z., & Tang, Y. (2020). Environmental collaborative governance degree of government, corporation, and public. *Sustainability (Switzerland)*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/su12031138>
- Dupuy, C., & Defacqz, S. (2022). Citizens and the legitimacy outcomes of collaborative governance An administrative burden perspective. *Public Management Review*, 24(5). <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2000254>
- Grootjans, S. J. M., Stijnen, M. M. N., Kroese, M. E. A. L., Ruwaard, D., & Jansen, M. W. J. (2022). Collaborative governance at the start of an integrated community approach: a case study. *BMC Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13354-y>
- Hafer, J., Ran, B., & Hossain, M. S. (2022). Rethinking Perspectives of Power in Collaborative Governance. *Journal of Public and Nonprofit Affairs*, 8(2). <https://doi.org/10.20899/jpna.8.2.260-280>
- Hutasoit, I. (2017). Pengantar Ilmu Kependudukan. In Alfabeta (p. 194). Alfabeta. http://eprints.ipdn.ac.id/5508/21/buku_imelda.pdf
- Hysing, E. (2022). Designing collaborative governance that is fit for purpose: theorising policy support and voluntary action for road safety in Sweden. *Journal of Public Policy*, 42(2). <https://doi.org/10.1017/S0143814X2000029X>
- Lahat, L., & Sher-Hadar, N. (2020). A threefold perspective: conditions for collaborative governance. *Journal of Management and Governance*, 24(1). <https://doi.org/10.1007/s10997-019-09465-1>
- Lelieveldt, H. (2023). Food industry influence in collaborative governance: The case of the Dutch prevention agreement on overweight. *Food Policy*, 114. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102380>
- McNaught, R. (2024). The application of collaborative governance in local level climate and disaster resilient development – A global review. In *Environmental Science and Policy* (Vol. 151). <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103627>

- Mukhlis, M., & Perdana, R. (2022). A Critical Analysis of the Challenges of Collaborative Governance in Climate Change Adaptation Policies in Bandar Lampung City, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/su14074077>
- Qi, H., & Ran, B. (2023). Paradoxes in collaborative governance. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2196290>
- Roengtam, S., & Agustiyara, A. (2022). Collaborative governance for forest land use policy implementation and development. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2073670>
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.
- Simangunsong, F., Hutasoit, I., & Jafa, B. J. (2025). *Dynamic Governance in Reducing Stunting in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia*. *Open Access Library Journal*, 12, 1–16. <https://doi.org/10.4236/oalib.1112336>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). Accountable government through collaborative governance? *Administrative Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/admsci11040127>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpisikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- U Kusyairi, ID Sartika, H Hidayah, S Hartati, N. N. (2022). Implementasi Manajemen Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini Sulapa Eppa. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 50(5). <https://doi.org/10.1093/scipol/scad034>
- Ulibarri, N., Imperial, M. T., Siddiki, S., & Henderson, H. (2023). Drivers and Dynamics of Collaborative Governance in Environmental Management. *Environmental Management*, 71(3). <https://doi.org/10.1007/s00267-022-01769-7>
- Yahya, A. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 39(4). <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1794425>